

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara dipegang oleh presiden selaku kepala pemerintahan serta dibantu oleh lembaga negara yang lain. Pengelolaan keuangan negara merupakan kesatuan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggung jawaban. Dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan terpercaya, lembaga pemerintah mempertanggung jawabkan anggaran negara yang dipakai selama satu tahun periode lewat laporan keuangan tahunan.

KPU merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional, tetap, dan mandiri. Untuk wilayah daerah, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjalankan pemilihan umum kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga yang menggunakan APBN dalam kegiatannya, Komisi Pemilihan Umum wajib membuat laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menurut Peraturan Menterei Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun serta menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah bagian neraca, terdapat aset lancar berupa persediaan. Persediaan menjadi aset penting guna membantu kegiatan operasional lembaga pemerintah. Persediaan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 06 tentang Akuntansi Persediaan, wujud dari persediaan bermacam-macam dan tiap lembaga dapat mempunyai keunikan dalam kepemilikan persediaan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai akuntansi persediaan penting dibahas agar pengelolaan aset persediaan sesuai dengan aturan dan dapat mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang akuntabel.

Anggi (2021) dalam penelitiannya disebutkan bahwa BKKBN Provinsi Riau sudah menyajikan dan mengungkapkan persediaan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 05 Tahun 2010. Pada saat pengungkapan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) belum sepenuhnya dijelaskan secara detail sehingga belum menampilkan laporan keuangan yang benar-benar valid.

Hendir (2020) dalam penelitiannya disebutkan bahwa akuntansi persediaan yang dilakukan kantor Inspektorat Kabupaten Bantaeng belum sepenuhnya memperhatikan perlakuan akuntansi persediaan secara tepat dan benar. Agar hasil laporan keuangan akuntabel, pemahaman mengenai perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan harus tepat.

Pada tahun 2020, Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi di beberapa wilayah di daerah. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan tugas dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan Pilkada

2020, KPU membutuhkan aset persediaan yang banyak agar proses pelaksanaan kegiatan pemilihan dapat berjalan dengan baik. Seperti pada pemilihan sebelumnya, KPU memiliki aset persediaan yang unik berbeda dari lembaga lain berupa kotak suara, bilik suara, dan surat suara. Tantangan baru yang muncul adalah menyelenggarakan pemilihan pemilu di tengah pandemi Covid 19 yang masih melanda Indonesia. KPU Kabupaten Semarang menyelenggarakan Pilkada 2020 untuk memilih Bupati/Wakil Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kondisi pandemi membuat anggaran belanja persediaan ditambah guna memenuhi standar protokol kesehatan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meninjau penerapan akuntansi persediaan di lembaga pemerintahan khususnya di lingkungan KPU Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, penulis mengangkat Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA KPU KABUPATEN SEMARANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan digunakan dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana anggaran terkait belanja barang pada KPU Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana klasifikasi dan pencatatan persediaan pada KPU Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana pengakuan dan pengukuran persediaan pada KPU Kabupaten Semarang?

4. Bagaimana pengungkapan dan penyajian persediaan pada KPU Kabupaten Semarang?
5. Apakah pelaksanaan akuntansi persediaan pada KPU Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan standar kebijakan akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui anggaran belanja barang pada KPU Kabupaten Semarang
2. Untuk mengetahui klasifikasi dan pencatatan persediaan pada KPU Kabupaten Semarang
3. Untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran persediaan pada KPU Kabupaten Semarang
4. Untuk mengetahui pengungkapan dan penyajian persediaan pada KPU Kabupaten Semarang
5. Untuk meninjau kesesuaian antara pelaksanaan akuntansi persediaan pada KPU Kabupaten Semarang dengan standar kebijakan akuntansi yang ada

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis tugas akhir ini, penulis memfokuskan pembahasan mengenai penerapan akuntansi persediaan serta meninjau kesesuaian anggaran terkait aset persediaan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset persediaan pada KPU Kabupaten Semarang sesuai peraturan yang berlaku. Penulis membatasi penulisan dengan hanya meninjau terkait pelaksanaan akuntansi persediaan KPU Kabupaten Semarang.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Secara akademik merupakan salah satu syarat untuk kelulusan program diploma tiga (D III) jurusan akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN.
2. Secara teoritis untuk mempelajari lebih dalam mengenai pengetahuan tentang akuntansi persediaan dan hasil karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pendidikan bidang akuntansi.
3. Secara praktik sebagai salah satu masukan mengenai praktik akuntansi persediaan bagi KPU Kabupaten Semarang.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum penelitian yang dilakukan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Pembahasan meliputi latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam pembahasan. Terdapat penjelasan teori akuntansi pemerintah khususnya akuntansi persediaan meliputi anggaran, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan persediaan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, serta pembahasan hasil. Metode pengumpulan data berisi tentang teknik yang digunakan penulis untuk mengimpun data terkait penelitian seperti studi literatur, observasi, dan wawancara. Gambaran umum akan berisi data dan fakta terkait KPU Kabupaten Semarang. Bagian pembahasan berisi hasil dari tinjauan rumusan masalah topik yang dibandingkan dengan teori yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan penutup Karya Tulis Tugas Akhir yang berisi simpulan serta saran terkait tinjauan uraian pada bab-bab sebelumnya.